

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat dan negara, baik yang dilakukan pemerintah maupun warga negaranya yang melintasi batas negara. Interaksi yang dilakukan oleh pemerintah nasional dalam hubungan internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan mewujudkan program-program yang telah digariskan dalam kebijakan luar negeri. Seperti halnya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, negara pun tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya negara lain. Kondisi ini disebabkan oleh interdependensi yang terjadi karena suatu negara mempunyai keterbatasan *resource*, dimana kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan aktor nasional lainnya.

Peran baru perusahaan multinasional dalam hubungan internasional dari perspektif ekonomi politik internasional. Peran MNC selama ini terbatas dalam studi bisnis internasional sebagai sebuah entitas bisnis yang melakukan ekspansi secara internasional melalui investasi asing langsung. Perkembangan hubungan internasional yang dinamis telah mempengaruhi posisi dan strategi MNC hingga perannya sebagai aktor non negara dalam kajian hubungan internasional diakui keberadaannya.¹

Perusahaan Multinasional atau *Multinational Corporations* yang selanjutnya disebut MNCs merupakan actor utama dalam bisnis internasional. Jenis perusahaan ini pada saat sekarang memegang peranan yang penting untuk transaksi internasional. Perdagangan internasional seperti impor dan ekspor merupakan tahap awal dari operasi internasional

¹Tirta Nugraha Mursitama, Ph.D. "Peran Baru Perusahaan Multinasional dalam Hubungan Internasional: Tinjauan Ekonomi Politik Internasional". <http://ir.binus.ac.id/2013/05/08/peran-baru-perusahaan-multinasional-dalam-hubungan-internasional-tinjauan-ekonomi-politik-internasional/>. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2014 pukul 16.49.

perusahaan. Subjek dalam perdagangan internasional secara tegas sangat memperhitungkan peran pemerintah yang besar dalam hubungan dengan MNCs serta perusahaan lainnya dalam bisnis internasional.²

Di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, eksistensi MNCs telah mendominasi hampir dari setiap aspek kehidupan, baik dari segi kebutuhan primer bahkan sampai kebutuhan tersier. MNCs dapat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam perekonomian local dan memainkan peranan penting dalam hubungan internasional dan globalisasi. Seiring dengan perkembangan zaman, MNCs menjelma dalam bentuk perusahaan yang beragam dan tersebar di belahan dunia dari selatan-utara, New York-Indonesia, Inggris-Zimbabwe, antara lain: Apple Computer, AOL, AT&T, Bombardier, BP, Coca-Cola, Dell, The Walt Disney Company, Enron, Exxon, Fiat, Fonterra, Google, General Electric, General Motors, Halliburton, Hearst Corporation, Honda, HSBC, Hutchison Whampoa Limited, IBM, Jardine Matheson, Kyocera, Kalbe Farma, McDonald's, Microsoft, Nestlé, Nike, Inc., Nintendo, Nissan, Nortel Networks, Nokia, Monsanto, Parmalat, Philips, Shell, Schlumberger, Sony, Swire Group, Toshiba, Toyota, Wal-Mart Stores, Inc.³

Menurut W.F. Schoell (1993), MNCs adalah sebuah perusahaan yang berbasis di satu negara (disebut Negara induk) dan memiliki kegiatan produksi dan pemasaran di satu atau lebih Negaraasing (Negara tuan rumah). Sedangkan menurut S.C. Certo (1997) MNCs adalah sebuah perusahaan yang memiliki operasi yang signifikan pada lebih dari satu Negara dengan kekuatan modal, teknologi dan system manajemen yang baik, MNCs mengontrol aliran modal, teknologi dan bahkan distribusi barang melintasi batas-batas negara.⁴

²Ermawati. "Perusahaan Multinasional". Diambil dari https://www.academia.edu/5773693/Pengertian_MNC. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2014 pukul 16.49.

³Denny L. Sihombing. "Multinational Corporation, Organisasi Internasional atau Perusahaan Transnasional?". Diambil dari <http://dennylorenta.wordpress.com/2010/05/06/multinational-corporation-organisasi-internasional-atau-perusahaan-transnasional/>. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2014 pukul 17.32.

⁴Neeta Takky. "Keterlibatan MNC dalam Kejahatan Kemanusiaan di Negara Berkembang." Diambil dari <http://neetatakky.blogspot.com/2011/05/keterlibatan-mnc-dalam-kejahatan.html>. Diakses pada tanggal 01 Oktober 2014 pukul 17.08.

Dilihat dari pengertian diatas, Indonesia merupakan negara tuan rumah atau negara penerima bagi MNCs. MNCs menginvestasikan dana yang dimilikinya pada berbagai bidang di Indonesia, antara lain bidang otomotif, fashion, fastfood dan lain sebagainya. Keterbukaan negara Indonesia sebagai Host Country (negara yang menerima MNC) dalam menerima MNCs yang ingin membuka perusahaan di Negeranya juga turut membantu perkembangan dari MNC tersebut. Keuntungan yang diperoleh Indonesia ketika MNC tersebut membuka cabang di negaranya yaitu adanya penambahan dan penanaman modal asing, pendapatan pajak dan terbukanya lapangan pekerjaan bagi penduduk di Indonesia. Namun, selain keuntungan yang didapat ada juga kerugian bagi Indonesia yaitu adanya ketergantungan dari masyarakat terhadap produk asing.

Pada era globalisasi sekarang ini, keberadaan sebuah kendaraan bukan lagi sebuah barang mewah, melainkan menjadi penunjang gaya hidup masyarakat. Pemasaran kendaraan menjadi semakin pesat, sehingga MNCs dalam bidang otomotif berlomba-lomba untuk dapat memperluas pangsa pasar dalam rangka memperluas hegemoni perdagangannya di Indonesia.

Industri otomotif merupakan salah satu industri yang strategis dari sekian banyak industri lainnya, yang mempunyai peran cukup besar khususnya dalam meningkatkan perekonomian negara.⁵ Sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC) sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.011/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri No 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan serta Penanaman Modal Asing di Indonesia.⁶

⁵G.M. Meir. *Ekonomi Pembangunan Negara Berkembang : Teori Kebijakan*. (Jakarta : Grasindo, 1985). Hal.25.

⁶MenatapKebijakan Mobil Murah. <http://kemenperin.go.id/artikel/7185/kode-etik>. Diakses tanggal 03/11/2014 pukul 10.39.

Kebijakan yang dimaksudkan untuk menekan impor kendaraan ini memunculkan pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat serta dampak positif maupun negatif dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Nunuj Nurdjanah, Peneliti Transportasi Jalan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, dampak positifnya adalah penghasilan pajak Negara dari otomotif akan bertambah, serta masyarakat golongan ekonomi menengah akan merasakan punya mobil baru dengan harga terjangkau, dan sebagian pengguna sepeda motor mungkin akan berpindah pada mobil murah, serta mencegah masuknya mobil murah dari luar negeri atau Negara tetangga seperti dari Thailand yang sudah terlebih dahulu memproduksi mobil murah. Sedangkan dampak negatifnya adalah meningkatnya kepemilikan mobil pribadi, tentunya dibarengi meningkat kanpenggunaan mobil pribadi di jalan yang berakibat pada meningkatnya kepadatan lalu lintas dan meningkatkannya konsumsi BBM, serta peminat angkutan umum akan semakin berkurang.⁷ Sebagai bukti bahwa adanya peningkatan jumlah pengendara mobil, berikut ini disajikan tabel mengenai penjualan mobil dari tahun 2011-2013 di Indonesia.

Tabel 1.1.

Penjualan Mobil Tahun 2011-2013⁸

Tahun	Jumlah Penjualan (per unit)
2011	2.153.716
2012	4.209.170
2013	8.318.655

Jika dilihat dari tabel diatas, tingkat penjualan mobil mengalami kenaikan sebesar 100 persen dalam setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia dikatakan mampu untuk membeli mobil yang dikategorikan barang mewah tersebut. Kebijakan pemerintah mengenai mobil murah nasional pun akan meningkatkan daya beli masyarakat

⁷“Dampak Positif dan Negatif dari Kebijakan Mobil Murah”. Diambil dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/09/24/mtm36m-dampak-positif-dan-negatif-dari-kebijakan-mobil-murah>. diakses pada tanggal 01 Oktober 2014 pukul 22.48.

⁸Data di olah dari ”Pusat data Makro ekonomi Data Penjualan Mobil” <http://pusatdata.kontan.co.id/makroekonomi/mobil/>? Diambil pada tanggal 19/10/2014 pada pukul 23.35.

terhadap barang mewah ini, karena harga yang dapat dikatakan sangat terjangkau oleh masyarakat.

Kebijakan tentang mobil murah nasional ini tidak terlepas dari peranan MNCs sebagai perusahaan yang melakukan investasi dalam bidang otomotif di Indonesia. Program mobil murah ini setidaknya dapat mendatangkan investasi dalam bidang perakitan dan komponen lainnya yang dilakukan oleh MNCs kepada Indonesia. Di sisi lain, produk otomotif seperti mobil karya anak bangsa telah diabaikan oleh pemerintah. Contohnya seperti mobil Esemka yang dibuat oleh anak-anak SMK 2 Surakarta, mobil Komodo, Tawon, Gea, Marlip, Maleo, Wakaba, Timor dan Esemka Digdaya. Mobil karya anak bangsa ini tidak terlalu terkenal di pasaran Indonesia dibandingkan mobil bermerk dari Honda, Toyota, Daihatsu, dan lain sebagainya.

Disini penulis tertarik untuk menganalisis peranan dari MNCs terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam bidang otomotif. Kebijakan mobil murah nasional yang ramah lingkungan atau LCGC yang dibuat oleh pemerintah Indonesia pun secara tidak langsung dapat menguntungkan MNCs. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh MNCs Terhadap Kebijakan Otomotif di Indonesia Melalui Program Mobil Murah Nasional Tahun 2011-2013”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

“Mengapa Multinational cooperations berhasil mempengaruhi kebijakan otomotif Indonesia melalui program mobil murah nasional (LCGC) tahun 2011 –2013?”

C. Kerangka Teori/Konsep

1. Teori Dependensia (Ketergantungan)

Teori dependensia lahir dari kondisi pembangunan di Negara-negara dunia ketiga (Negara sedang berkembang) termasuk Indonesia. Menurut Bjon Hettne pendekatan “ketergantungan” (*dependencia*) menjadi bagian dari orientasi strukturalistik umum dalam teori pembangunan yang juga dipelopori oleh beberapa ahli ekonomi pembangunan di dunia pertama.⁹

Inti dari teori dependensia menurut Mochtar Ma’soed adalah penetrasi asing dan ketergantungan eksternal yang menyebabkan timbulnya distorsi besar-besaran dalam struktural ekonomi “pinggiran” (periphery), yang pada gilirannya menimbulkan konflik sosial yang gawat dan akhirnya mendorong timbulnya penindasan negara terhadap rakyat dimasyarakat yang tergantung itu. Hampir semua negara dunia ketiga sekarang mengalami penestresi mendalam oleh dan sangat tergantung pada, negara-negara industri maju (atau negara-negara “pusat”) dan terutama ekonomi dunia, penetrasi itu bisa melalui berbagai cara, ekonomi, politik dan kultur, dan pada berbagai periode perkembangan suatu negara.¹⁰

Teori dependensia sesuai dengan namanya berusaha menjelaskan tentang ketergantungan. Dalam hubungan ketergantungan tersebut ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak dominan dan pihak bergantung (dependen). Frank mengelompokkan negara-negara didunia ini atas dua kelompok yaitu negara metroplis maju dan negara-negara satelit yang terbelakang.

Hubungan ketergantungan seperti ini disebut Frank sebagai Metropolis-satelit relationship. Sementara fokus hubungan ketergantungan dalam model Frank adalah bangsa-bangsa dan hubungan antar bangsa-bangsa, ruang lingkup teorinya adalah sistem

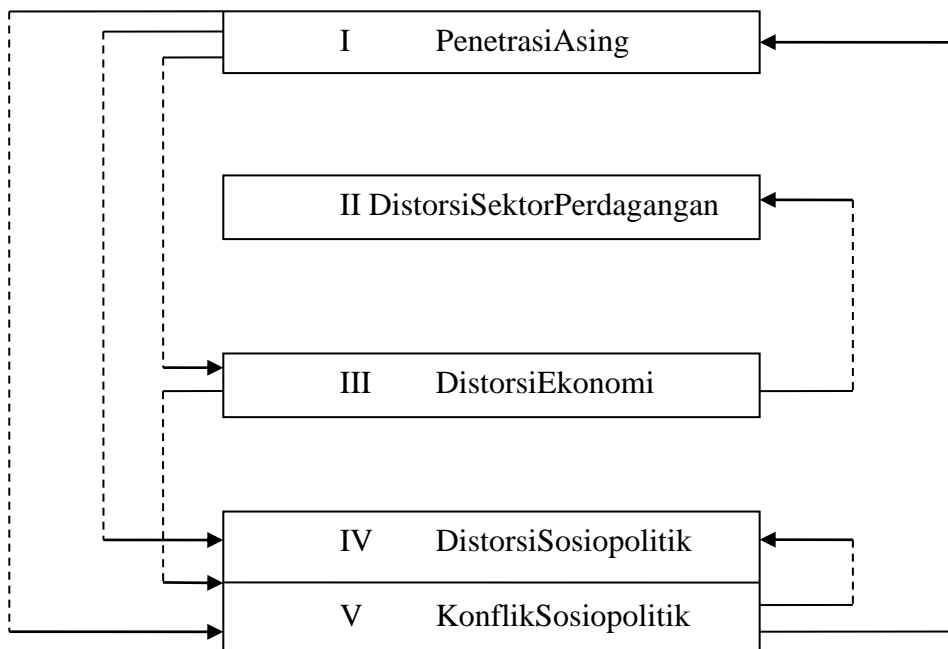
⁹BjonHettne.*Teori Pembangunan danTigaDunia*, Jakarta : PT. GramediaPustakaUtama, 2001, hal.9.

¹⁰MohtarMas’oedberjudul“ *IlmuHubunganInternasional (DisiplindanMetodologi)*”. LP3ES (1990) 240-248.

kapitalis dunia. Dalam model yang dikembangkan Frank, tiap titik dalam rantai metropolis-satelit, struktur rantai menciptakan kepentingan objektif tertentu, dan yang paling penting adalah kepentingan dalam mengontrol hubungan monopoli pada tiap titik di rantai hubungan tersebut demi memperoleh manfaat dari extractive power yang ada pada posisi tersebut.¹¹ Menurut Frank keterbelakangan dinegara-negara satelit hanya bisa dipahami dengan mengetahui kondisi awal, khuluk dan perkembangan dari kapitalisme.

Menurut Theotonio Dos Santos, Dependensi (ketergantungan) adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Bila negara pusat berkembang, maka negara pinggiran juga ikut berkembang (perkembangan yang tergantung).

Jika digambarkan maka pemikiran mengenai teori dependensia adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1

¹¹Robert Jackson dan Georg Sorensen. *Penghantar Studi Hubungan Internasional*. (Pustaka Pelajar, Cetakan II, 2009) hal. 260-262.

Model Sederhana Teori Ketergantungan¹²

Gambar di atas menjelaskan bahwa penetrasi asing merupakan komponen utama yang menyebabkan timbulnya suatu kondisi ketergantungan, hal ini akan berujung pada munculnya berbagai konflik social politik, ekonomi, maupun budaya.

Ada tiga bentuk situasi ketergantungan antara *dominant countries* dan *dependen countries* menurut Dos Santos, yaitu :¹³

a. Ketergantungan Kolonial

Dimana negara dominan melakukan tindakan monopoli pemilikan tanah, pertambangan, tenaga kerja, dan hasil bumi untuk melengkapi monopoli negara dominan/penjajah itu sendiri. Sehingga kapital finansial dan perdagangan dibawah otoritas negara penjajah. Akibatnya ekonomi domestik ditentukan negara dominan. Pada situasi ini terjadi hubungan ketergantungan yang bersifat eksploitatif.

b. Ketergantungan Industri Keuangan

Setelah abad ke 19 ekonomi negara dependen berorientasi pada keperluan konsumsi dan pasar negara-negara dominan. Pada ketergantungan ini adanya hegemoni kapital oleh negara kuat pada negara berkembang. Investasi diarahkan pada produk *raw-material* dan pertanian untuk konsumsi negara kapitalis.

c. Ketergantungan Teknologi Industri

Bentuk hubungan ini lahir setelah perang dunia kedua ketika pembangunan industri mulai terjadi pada berbagai negara terbelakang. Adanya kehadiran MNCs, negara berkembang menyewa hak paten dari produk negara maju, investasi

¹²Raymon Duvall, at, all "A Formal Model of Dependencia Theory: Structur and Measurement", dalam R Morritdan B. Russet (Eds) From National development to Global Community (Allen &Unwin, 1981), dalam Mochtar Mas' oed Displindan Metodologi hal.209.

¹³IMDIAN. "Review_2 Teori-teori Pembangunan". Teori Dependensi Klasik Diambil dari :<http://www.imdianfisipusu.cf/2014/09/review2-teori-teori-pembangunan.html> Diambil pada tanggal 19/10/2014 pada pukul 23.35.

diarahkan untuk pemenuhan pasar dalam negeri negara terbelakang, input untuk industri dari negara maju, dan perkembangan industri tergantung fluktuasi neraca pembayaran. Serta monopoli teknologi negara maju menyebabkan negara berkembang harus membayar sewa, yakni sewa hak paten. Ini berarti ada surplus ekonomi dari negara berkembang ke negara maju.

Selain bentuk-bentuk situasi ketergantungan tersebut, di dalam teori dependensi ini terdapat asumsi dasar, sebagai berikut :

- a. Keadaan ketergantungan dilihat dari satu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh negara dunia ketiga. Teori dependensi berusaha menggambarkan watak-watak umum keadaan ketergantungan di Dunia Ketiga sepanjang perkembangan kapitalisme dari Abad ke-16 sampai sekarang
- b. Ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh “faktor luar”, sebab terpenting yang menghambat pembangunan karenanya tidak terletak pada persoalan kekurangan modal atau kekurangan tenaga dan semangat wiraswasta, melainkan terletak pada diluar jangkauan politik ekonomi dalam negeri suatu negara. Warisan sejarah kolonial dan pembagian kerja internasional yang timpang bertanggung jawab terhadap kemandekan pembangunan negara Dunia Ketiga
- c. Permasalahan ketergantungan lebih dilihatnya sebagai masalah ekonomi, yang terjadi akibat mengalir surplus ekonomi dari negara Dunia Ketiga ke negara maju. Ini diperburuk lagi kerana negara Dunia Ketiga mengalami kemerosotan nilai tukar perdagangan relatifnya.
- d. Situasi ketergantungan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global. Disatu pihak, mengalirnya surplus ekonomi dari Dunia Ketiga menyebabkan keterbalakangannya, satu faktor yang mendorong lajunya pembangunan dinegara maju.

- e. Keadaan ketergantungan dilihatnya sebagai suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan. Bagi teori dependensi, pembangunan di negara pinggiran mustahil terlaksana. Sekalipun sedikit perkembangan dapat saja terjadi dinegara pinggiran ketika misalnya sedang terjadi depresi ekonomi dunia atau perang dunia. Teori dependensi berkeyakinan bahwa pembangunan yang otonom dan berkelanjutan hampir dapat dikatakan tidak mungkin dalam situasi yang terus menerus terjadi pemindahan surplus ekonomi ke negara maju.

Indonesia sebagai negara berkembang sangat bergantung terhadap negara maju, dan perusahaan-perusahaan internasional. Kondisi ini lebih diperparah akibat adanya program mobil murah, konsumsi bahan bakar akan semakin tinggi, kebutuhan BBM (bahan bakar minyak) minyak mobil per bulan 200 liter dan motor 20 liter per bulan.

Program penghematan bahan bakar nasional akan gagal. Bisa lebih banyak kita impor minyak dari luar. Jadi, bukan menyelesaikan masalah transportasi, tapi justru bertambah runyam. solusi yang ditawarkan Menteri perindustrian soal pemerataan distribusi mobil murah ke daerah diluar Jakarta. Buktinya, dari segi pesanan, tetap saja DKI penyumbang terbesar,

Alasan pemerintah meluncurkan mobil murah demi rakyat miskin dipandang justru salah. Sebaliknya, dengan adanya program mobil murah ujung-ujungnya perusahaan asing yang di untung dengan program tersebut selain itu juga beban bagi masyarakat miskin dan juga bagi pemerintah dalam segi kemacetan dan penyediaan bahan bakar.

Jika dilihat dari kebutuhan lanjut masyarakat miskin sehari-hari berjuang memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Bagi mereka, mobil masih masuk kategori barang tersier.

2. Teori Gabriel Almond

Dalam tahun 1956, tiga tahun setelah David Easton menerbitkan bukunya yang pertama tentang sistem politik, Gabriel Almond menerapkan suatu tipologi pada sistem politik nasional. Bersama-sama dengan ilmuwan komparatif politik lainnya, Almond menyusun rumusan yang baru, memanfaatkan sistem politik sebagai dasar dan berbelok ke serangkaian konsep yang berhubungan dengan struktur dan fungsi. Konsepsi Almond tentang sistem politik muncul melalui beberapa tahap (Chilcotte, 1962):

Tahap Pertama: Tipologi awal tentang sistem politik dari Almond, yang dijelaskan dalam artikelnya yang ditulis tahun 1956, berisi beberapa aspek:

1. Ia menarik ide tentang sistem dari David Easton; sistem adalah merupakan "konsep yang inklusif yang meliputi semua tindakan yang terpolakan yang relevan dengan pembuatan keputusan politik". Bagi Almond, sistem lebih berguna daripada proses; sistem menunjukkan keseluruhan, interaksi di antara unit-unit di dalam keseluruhan, dan stabilitas dalam interaksi tersebut yang ia gambarkan sebagai "keseimbangan yang sedang berubah" (changing equilibrium).
2. Almond sepenuhnya bersandar pada Max Weber dan Talcott Parsons dalam menjelaskan sistem politik dari tindakan. Tekanannya pada tindakan menjadikan pengamat politik dapat menghindari untuk menggambarkan sistem semata-mata hanya sebagai suatu kesatuan formal atau legal. Bukannya bersandar pada konsep-konsep seperti lembaga, organisasi, atau kelompok, Almond berpaling kepada peranan dan struktur. Peranan merupakan unit-unit sistem politik yang berinteraksi, dan struktur merupakan pola interaksi. Penggunaan istilah ini memungkinkan kita melakukan penyelidikan tidak hanya pada lembaga-lembaga formal akan tetapi juga lembaga-lembaga informal (seperti keluarga).

3. Almond memperkenalkan konsep budaya politik yang tidak sama dengan budaya pada umumnya atau juga tidak sama dengan sistem atau masyarakat tertentu. Walaupun demikian, budaya politik berkaitan dengan sistem politik, karena setiap budaya politik diejawantahkan dalam pola-pola orientasi terhadap tindakan politik tertentu, dan pola-pola ini biasanya meluas sampai di luar batas sistem politik.

Tahap Kedua: Selama tahun 1958 dan 1959 Almond bersama-sama dengan teman-temannya memusatkan perhatiannya pada politik di negara-negara sedang berkembang. Mereka menjelaskan suatu teori struktur dan fungsi dalam usahanya untuk menghindari melakukan pengamatan melalui konstitusi dan lembaga-lembaga pemerintahan yang formal di negara-negara di mana perubahan sedang terjadi secara meluas. Pada tahun 1960 Almond dan temannya James S. Coleman memperkenalkan beberapa asumsi yang tujuannya antara lain untuk memperbaiki kembali konsep-konsep perbandingan politik (Chilcotte, 1963). Dengan demikian, pendekatan sistem politik yang telah menarik perhatian banyak berkonotasi legalistik). Konsep "peranan" menggantikan konsep "jabatan", dan konsep "struktur" menggantikan konsep "lembaga". Almond mengatakan bahwa sistem politik mempunyai ciri-ciri yang bersifat universal dan bahwa untuk tujuan teoritik dan analisis, ciri-ciri ini dapat dikonseptualisasikan ke dalam pendekatan skematik untuk melakukan studi perbandingan politik. Empat ciri-ciri tersebut antara lain adalah:

1. Semua sistem politik memiliki struktur politik;
2. Fungsi yang sama diperlihatkan dalam semua sistem politik;
3. Semua struktur politik bersifat multifungsional;
4. Semua sistem politik tidak dapat dipisahkan dari proses kebudayaan.

Keempat ciri ini menjadi dasar bagi studi komparatif tentang sistem politik dari negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Almond berpendapat bahwa struktur yang sama ditemukan di manapun, tetapi untuk mengetahui letaknya, pertanyaan-pertanyaan

fungsional yang betul harus diajukan. Hanya dengan cara ini kita dibimbing ke arah representasi yang akurat dari suatu proses yang dinamis. Almond dipengaruhi juga oleh kerangka kerja David Easton tentang inputs, outputs dan feedback yang ia rasakan bergerak ke arah "teori fungsional yang sistematis". Tetapi teori David Easton ini masih dianggap memiliki keterbatasan, oleh karena itu ia kemudian membuat gambaran tentang kategori-kategori fungsionalnya sendiri, dan memisahkannya sesuai dengan inputs dan outputs.

1. Fungsi-fungsi Inputs:

- a. Sosialisasi dan rekrutmen politik
- b. Artikulasi kepentingan
- c. Agregasi kepentingan
- d. Komunikasi politik

2. Fungsi-fungsi Outputs :

- a. Pembuatan peraturan (*rule making*)
- b. Penerapan peraturan (*rule application*)
- c. Pengadilan peraturan (*rule adjudication*)

Outputs adalah merupakan fungsi pemerintahan dan yang sesuai dengan kegunaan tradisi dari tiga kekuasaan yang terpisah di dalam pemerintahan. Rule making menggantikan badan pembuat undang-undang. Rule application menunjuk administrasi. Rule adjudication berhubungan dengan proses judicial (pengadilan).

Almond berpendapat bahwa fungsi inputs atau fungsi politik, bukan fungsi outputs atau fungsi pemerintahan, sifatnya penting untuk mengetahui ciri-ciri sistem politik di negara-negara yang sedang berkembang. Fungsi-fungsi ini mewakili bahan-bahan dari sistem: yaitu siapa yang mengenali persoalan-persoalan; mengidentifikasi, menjelaskan, dan memecahkan isu-isu; dan memberikan pemecahan; dan bagaimana tindakan-tindakan tersebut dilakukan. Spiro mengatakannya sebagai proses "aliran kebijakan" (*policy flow*), dan

Easton mengatakannya sebagai terdiri dari tuntutan dan dukungan bagi tindakan. Bagi Almond sosialisasi politik mendorong orang berpartisipasi dalam kebudayaan politik dari suatu masyarakat; sosialisasi terjadi melalui keluarga, sekolah, pekerjaan, kelompok keagamaan, perkumpulan kesukarelawanan, partai politik, dan bahkan lembaga pemerintahan.

Sosialalisasi politik melibatkan rekrutmen orang-orang yang berasal dari kelas-kelas, kelompok-kelompok etnis dan semacamnya ke dalam sistem politik dari partai-partai politik, birokrasi, dan sebagainya. Artikulasi kepentingan merupakan ekspresi kepentingan politik dan tuntutan bagi tindakan. Agregasi kepentingan merupakan penggabungan kepentingan-kepentingan dan tuntutan yang diartikulasikan oleh partai politik, kelompok kepentingan, dan kesatuan-kesatuan politik lainnya. Komunikasi politik menjamin semua fungsi-fungsi politik ini. Sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan terjadi melalui komunikasi. Almond memandang budaya politik sebagai bersifat dualistik dan bukannya monistik. Sehingga sistem politik bisa diketahui cirinya sebagai sistem politik yang modern atau pra modern, atau sistem politik yang sudah maju atau sedang berkembang, atau sistem politik industrial atau agraris. Pokoknya ia melihat sistem politik sebagai muncul melalui tahapan-tahapan perkembangan. Struktur cenderung menjadi lebih terdeferensiasikan (terpilah-pilahkan) dan terspesialisasikan ketika sistem itu mencapai tahap perkembangan yang tertinggi. Secara khusus Almond menunjuk sistem primitif, sistem tradisional, sistem transisional dan sistem modern. Sistem yang sedang berkembang ditandai oleh "*traditional styles of diffuseness, particularism, ascriptiveness, and affectivity*" dan sistem yang lebih maju ditandai oleh "*rational styles of specificity, universalism, achievement, and affective neutrality*".

Ciri-ciri yang rasional menggeser sistem primitif dan tradisional, walaupun tradisionalitas tidak pernah hilang di dalam sistem politik modern. Sistem modern cenderung

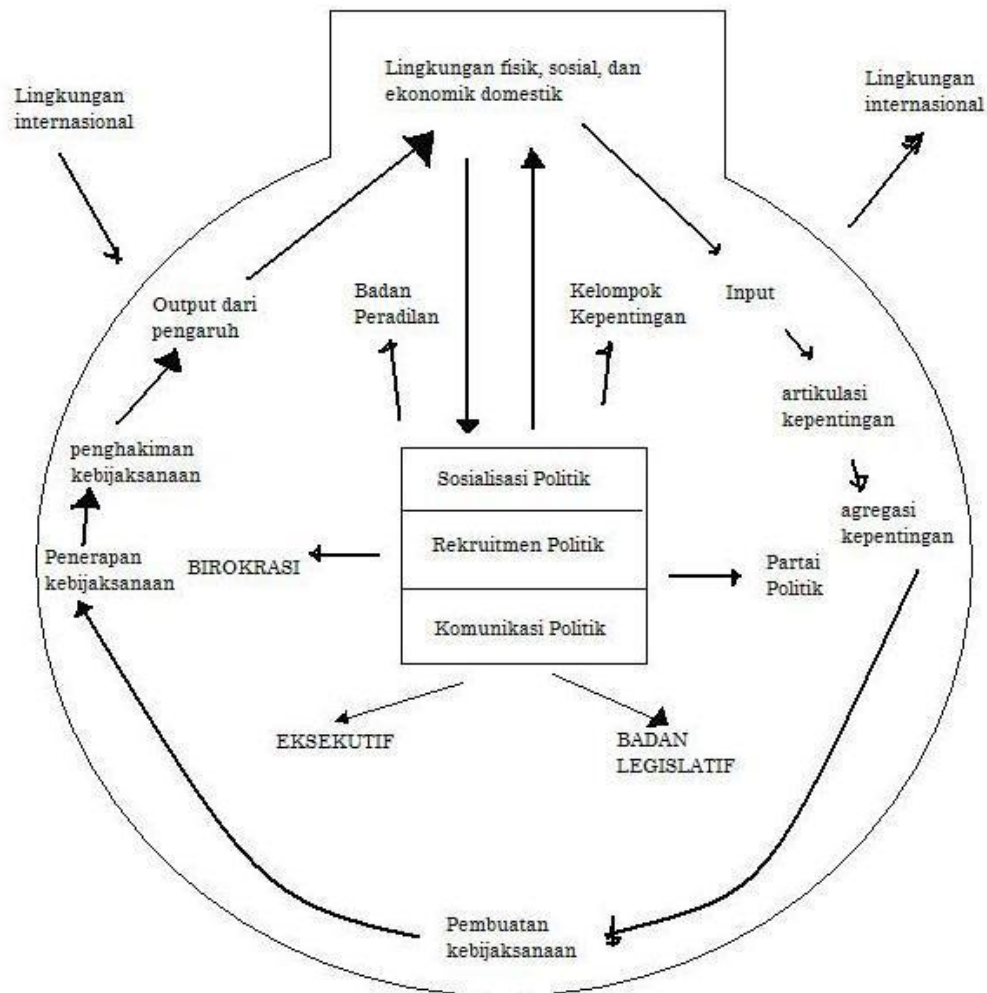
mengatur dan mengontrol tradisionalitas. Almond percaya bahwa skemanya ini memungkinkan ilmuwan politik dapat berpindah ke arah teori probabilistik dari masyarakat politik. Rancangannya tentang fungsi dan struktur mengatakan bahwa "sistem politik bisa dibandingkan dengan ukuran probabilitas penampilan dari fungsi-fungsi khusus oleh struktur yang khusus". Ia bahkan berspekulasi bahwa teori sistem politiknya bisa menggunakan penerapan matematika dan statistika. Lebih lanjut ia menyatakan harapannya bahwa teori modernisasi dan penerapannya pada persoalan-persoalan dunia bisa digunakan.

Tahap Ketiga: Pendekatan fungsional ini pada tahun 1965 disempurnakan lagi oleh Almond. Penyempurnaan ini menghasilkan enam klasifikasi, termasuk tiga fungsi pemerintahan yang asli atau fungsi output dan juga artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi. Fungsi-fungsi ini menjadi proses konversi yang memungkinkan terjadinya transformasi tuntutan dan dukungan yang mengalir ke dalam sistem politik. Diluar dari sistem politik itu mengalirlah ekstraksi, peraturan dan distribusi ke dalam masyarakat atau lingkungan internasional. Dalam hal ini, pendekatan Almond sama dengan Easton. Rumusan baru Almond berusaha untuk memperhatikan kritik-kritik terhadap karya-karyanya yang terdahulu.

1. Ia berpendapat bahwa konsepsinya tentang sistem politik berkaitan dengan "interdependensi", tetapi bukan "harmoni". Ia mengakui bahwa teorikus-teoritikus sistem telah terlampau banyak berada di bawah pengaruh analogi mekanis dan biologis. Penakanannya pada interdependensi merupakan usaha untuk menghadapi kritik-kritik yang mengatakan bahwa pendekatannya mengandung bias yang sangat bersifat statis dan konservatif, karena ia menekankan pada ekuilibrium atau harmoni dari bagian-bagian.
2. Ia menganggap rumusan barunya tentang teori sistem bersifat dinamis dan bukannya statis dan konservatif karena pendekatan ini memperbolehkan dilakukannya

pengamatan "perkembangan pola-pola". Akibatnya Almond mengakui keutamaan kepustakaan substansial tentang pembangunan politik yang terbit di tahun 1960-an. Usahnya untuk mengkaitkan teori sistem dengan teori pembangunan diliputi oleh pertimbangan-pertimbangan etnosentris.

- Almond nampaknya sedang mencari suatu teori yang holistik bukannya persial: "Kita perlu melihat sistem politik sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh dan yang dibentuk oleh lingkungannya". Dalam hal ini, Almond mengikuti langkah Easton, tetapi ia memberikan substansi kepada teori dengan menufjukan pada pengalaman nyata dari beraneka-ragamnya bangsa-bangsa dan pada situasi yang nyata.¹⁴



Gambar 1. 2.

¹⁴ <http://sarsito1949.files.wordpress.com/2011/11/spi-bab-2.pdf>

Model Sistem Politik Gabriel Almond

Gambar di atas menggambarkan elemen-elemen dari sistem politik menurut Almond. Almond memperkenalkan banyak istilah tentang sistem politik, dan istilah-istilah ini didefinisikan dan didiskusikan secara luas dalam bukunya. Diagram tersebut bisa membantu kita memahami hubungan di antara istilah-istilah dan tingkat-tingkat fungsional.

Menurut Almond, sistem politik terdiri dari banyak bagian yang satu sama lain saling bergantung. Bagian-bagian ini meliputi lembaga-lembaga pemerintahan dan juga semua struktur dalam aspek-aspek politiknya. Garis batas ada di antara sistem itu dengan lingkungannya. Input dan output mempengaruhi sistem itu, dan feedback ada di antara sistem dan lingkungannya. Almond menunjukkan empat contoh tuntutan dan empat contoh dukungan yang menjamin sistem sebagai input. Ia juga menggambarkan empat jenis transaksi yang berhubungan dengan output dari proses itu. Diagram ini selain memasukan tiga aspek sebagaimana digambarkan oleh Easton, juga menggabungkan tiga tingkatan fungsi ke dalam rumusannya sendiri.

Tingkatan kegiatan yang pertama terdiri dari enam fungsi konversi: artikulasi kepentingan (*interest articulation*), agregasi kepentingan (*interest aggregation*), komunikasi politik (*political communication*), pembuatan peraturan (*rule making*), penerapan peraturan (*rule application*), dan pengadilan peraturan (*rule adjudication*); fungsi-fungsi ini berhubungan dengan inputs yang berupa tuntutan (*demands*) dan inputs yang berupa dukungan (*supports*) dan dengan outputs yang berupa keputusan (*decisions*) dan outputs yang berupa tindakan (*actions*) seperti telah terinternalisasi dalam sistem politik. Tuntutan dirumuskan melalui artikulasi kepentingan dan digabungkan ke dalam arah tindakan alternatif melalui agregasi kepentingan. Peraturan digambarkan melalui pembuatan peraturan, dilaksanakan dan dipaksakan melalui penerapan peraturan, dan kadang-kadang mereka dinilai melalui pengadilan peraturan. Komunikasi mempengaruhi semua kegiatan ini.

Tingkatan kegiatan yang kedua dari kegiatan ini berupa fungsi kapabilitas: pengaturan (*regulation*), pengestrasian (*extraction*), pembagian (*distribution*), dan tanggapan simbolis (*symbolic response*); fungsi-fungsi ini berhubungan dengan penampilan sistem itu didalam lingkungannya. Almond menerapkan fungsi-fungsi ini pada masyarakat totaliter dan masyarakat demokratis. Ia merasa bahwa dalam masyarakat demokratis: output dari "*regulation*", "*extraction*", dan "*distribution*" lebih dipengaruhi oleh input yang berupa tuntutan dari kelompok-kelompok yang ada dan bahwa masyarakat ini oleh karena itu memiliki kapasitas responsif yang lebih tinggi. Sebaliknya masyarakat totaliter kurang responsif terhadap tuntutan, mengatur perilaku melalui paksaan, dan mengekstrasikan sumber yang sebanyak-banyaknya dari rakyat. Kapabilitas simbolis berhubungan dengan mengalirnya simbol dari sistem politik ke lingkungan internasional.

Teori pengambilan keputusan terdapat dalam teori sistem politiknya Almond. Fungsi output yang dimaksud oleh Almond adalah merupakan teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan adalah teori-teori atau teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan ini memiliki fungsi dan tujuannya sendiri, yaitu sebagai berikut:¹⁵

1) Fungsi Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi antara lain sebagai berikut.

- a) Pangkal permulaan dari semua aktifitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional.
- b) Sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkutan paut dengan hari depan, masa yang akan datang, dimana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama.

¹⁵*Ibid.*

2) Tujuan Pengambilan Keputusan

Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua, yaitu sebagai berikut :

a) Tujuan yang bersifat tunggal

Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyang satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan, tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain.

b) Tujuan yang bersifat ganda

Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah (atau lebih), yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif.

a. Proses Pengambilan Keputusan¹⁶

Proses pengambilan keputusan merupakan tahap-tahap yang harus dilalui atau digunakan untuk membuat keputusan. Tahap-tahap ini merupakan kerangka dasar, sehingga setiap tahap dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa sub tahap (disebut langkah) yang lebih khusus/spesifik dan lebih operasional. Secara umum, proses pengambilan keputusan ini melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut :

1) Perumusan Masalah

Tahap ini merupakan tahap untuk mendefinisikan masalah dengan jelas, sehingga perbedaan antara masalah dan bukan masalah (misalnya isu) menjadi jelas.

2) Pemecahan Masalah

Tahap ini merupakan tahap penyelesaian terhadap masalah yang sudah ada atau sudah jelas. Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut :

a) Identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk merencanakan masalah

¹⁶Alfa Firdaus. Analisis Keputusan. UMB : Pusat Pengembangan Bahan Ajar

- b) Perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia, identifikasi peristiwa-peristiwa di masa datang (*state of nature*)
 - c) Pembuatan alat (sarana) untuk mengevaluasi atau mengukur hasil, biasanya berbentuk tabel hasil (*pay off table*)
 - d) Pemilihan dan penggunaan model pengambilan keputusan
- 3) Pengambilan Keputusan

Keputusan yang diambil adalah berdasarkan pada keadaan lingkungan atau kondisi yang ada, seperti kondisi pasti, kondisi beresiko, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik.

Pengambilan keputusan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa kelompok seperti kelompok kepentingan atau kelompok penekan. Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik, kelompok ini tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Masyarakat bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya. Kelompok ini tempat menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat, serta menyampaikannya kepada sistem politik yang ada. Kelompok ini penting bagi anggota masyarakat. Gabriel A. Almond mengidentifikasi kelompok kepentingan ke dalam jenis-jenis kelompok :

- *Interest Group Asosiasi*

Interest group khusus didirikan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat atau golongan, namun masih mencakup beberapa yang luas. Yang termasuk kelompok ini adalah Ormas. misalnya NU, Muhammadiyah, Kadin, SPSI, dll.

- *Interest Group Institusional*

Interest group pada umumnya terdiri atas berbagai kelompok manusia berasal dari lembaga yang ada, dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan orang-orang yang menjadi anggota lembaga yang dimaksudkan. Misalnya PGRI, IDI, dan organisasi seprofesinya.

(3) *Interest Group Non-asosiasi*

Interest group ini didirikan secara khusus dan kegiatannya juga tidak dijalankan secara teratur, tetapi aktivitasnya kelihatan dari luar apabila masyarakat memerlukan dan dalam keadaan mendesak. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini, dapat berwujud masyarakat setempat tinggal, masyarakat seasal pendidikan, masyarakat seketurunan, dll.

(4) *Interest Group Anomik*

Interest group inidapat terjadi secara mendadak dan tidak bernama. Aktivitas pada umumnya berupa aksi-aksi demonstrasi atau aksi-aksi bersama. Apabila kegiatannya tidak terkendalikan, dapat menimbulkan keresahan dan kerusuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat secara stabilitas nasional. Untuk mencegah dampak aktivitas buruk kelompok ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang hak mengeluarkan pendapat dimuka umum.

Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat dipenuhi namun dapat pula terabaikan dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu rakyat berkepentingan dan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintahnya. Oleh sebab di atas, mereka dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan mereka kepada pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama atas dasar kepentingan yang sama.

Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik, karena tujuan partai politik adalah menduduki jabatan publik. Kelompok kepentingan memberikan input yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya. Input yang mereka berikan bertujuan agar pandangan-pandangan mereka dipahami oleh para pembuat keputusan dan agar mendapat output yang sesuai dengan tuntutan mereka.

Dalam tulisannya Gabriel A. Almond, mengatakan untuk memberikan input pada pembuat kebijakan, saluran-saluran yang penting dan biasa digunakan adalah demonstrasi dan tindakan kekerasan; tindakan ini biasa digunakan untuk menyatukan tuntutan kepada pembuat kebijakan. Hubungan pribadi; hubungan langsung akan memudahkan dalam pencapaian tujuan, akan lebih mudah menerima saran teman, keluarga, atau orang lain yang dikenal daripada mendapat tuntutan dari orang yang tidak dikenal meskipun itu melalui sarana formal. Perwakilan langsung; perwakilan langsung dalam struktur pembuatan keputusan akan memungkinkan suatu kelompok kepentingan untuk mengkomunikasikan secara langsung dan kontinyu kepentingan-kepentingannya melalui seorang anggota aktif struktur tersebut. Saluran formal dan institusional lainnya; media massa merupakan alat yang cukup efektif untuk menyalurkan tuntutan politik, selain itu adalah partai politik, kemudian adalah badan legislatif, kabinet, dan birokrasi, dengan menjadi bagian di dalamnya, aktifitas melobi untuk mencapai tuntutan kelompok kepentingannya akan dapat dilakukan.

Peran dan saluran-saluran yang digunakan kelompok kepentingan ini berbeda di setiap negara, mereka melakukan peranannya sesuai dengan tujuan yang mereka ingin capai, demikian pula dengan saluran-saluran yang mereka gunakan. Satu saluran yang dianggap efektif bagi satu kelompok kepentingan belum tentu efektif bagi yang lain.¹⁷

¹⁷ <http://amirnaya.blogspot.com/p/blog-page.html>

Sedangkan kelompok penekan merupakan salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yang mempunyai kepentingan sama, antara lain:

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan
- c. Organisasi kepemudaan
- d. Organisasi pembela Hukum dan HAM
- e. Yayasan atau Badan hukum lainnya.

Mereka pada umumnya dapat menjadi kelompok penekan dengan cara mengatur orientasi tujuan-tujuannya yang secara operasional (melakukan negosiasi) sehingga dapat mempengaruhi kebijaksanaan umum. Secara sederhana, jenis kelompok penekan (*pressure group*) di Indonesia dapat diidentifikasi menjadi paling tidak tiga jenis kelompok penekan, berdasarkan gerak perjuangannya, yaitu:

- a. Bentuk perjuangan kelompok penekan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui program-program ekonomi dan sosial dan berbasiskan pada swadaya murni organisasi.
- b. Bentuk kelompok penekan yang mengemas kepentingan kelompok menjadi kepentingan-kepentingan penegakan hak asasi manusia dan demokratisasi.
- c. bentuk kelompok penekan yang tidak memiliki arah perjuangan yang konsisten, dan hanya bersifat berada dalam waktu yang temporer sehingga visi dan misinya secara praktis berubah-ubah.

Tuntutan-tuntutan yang marak bermunculan dari kelompok-kelompok penekan yang ditujukan kepada pemerintah hanya akan semakin melemahkan derajat konsentrasi pemerintah yang saat ini dalam kondisi sangat lemah.¹⁸

D. Hipotesa

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan hipotesa sebagai berikut:

1. Program mobil murah nasional hanya akan menambah permasalahan di dalam negeri khususnya di bidang transportasi. Selain itu juga program mobil murah tersebut tidak menjadi solusi untuk memperbaiki transportasi di Indonesia. Dengan adanya program mobil murah tersebut pemerintah tidak memberi kesempatan kepada produk-produk mobil dalam negeri untuk bersaing sehingga dengan adanya program tersebut hanya akan mematikan kreativitas anak bangsa. Karna sudah sangat jelas produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk-produk mobil perusahaan luar negeri.
2. Kerja sama pemerintah Indonesia dengan MNC menggambarkan Negara (pemerintah) melalui kekuasaan pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mendapatkan dukungan terhadap masyarakat Indonesia kegiatan operasi perusahaan-perusahaan multi nasional, tapi sangat disayangkan akumulasi model program tersebut hanya menguntungkan pihak multi nasional cooperation.

¹⁸ http://www.pandeanggarnata.com/?Tong_Kosong/Infrastruktur_dan_Suprastruktur_Politik_di_Indonesia

E. Metode Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini menggunakan dasar metode studi kepustakaan (*library research*) dalam upaya pengumpulan datanya. Berbagai data dari buku, surat kabar, jurnal, dokumen dan sumber internet dijadikan sebagai referensi.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini ditampilkan dalam lima bab, yakni meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar teori/konsep, hipotesa, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II PERKEMBANGAN MNCs DALAM BIDANG OTOMOTIF DI INDONESIA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah pertumbuhan otomotif di Indonesia, dan peranan MNCs dalam perkembangan otomotif di Indonesia.

BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG OTOMOTIF DI INDONESIA

Bab ini akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang otomotif, latar belakang dan tujuan kebijakan mobil murah nasional yang dibuat oleh pemerintah, serta dampak kebijakan tersebut terhadap perkembangan otomotif di Indonesia.

BAB IV PENGARUH MNCs TERHADAP PERKEMBANGAN OTOMOTIF DI INDONESIA MELALUI MOBIL MURAH NASIONAL DI INDONESIA

Dalam bab ini akan ditulis peranan MNCs terhadap perkembangan otomotif di Indonesia, dampak yang akan terjadi di perusahaan local (perusahaan dalam negeri) sebagai bentuk adanya mobil murah nasional di Indonesia, dan terbentuknya ketergantungan akan perusahaan industry luar negeri yang lebih maju.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.